



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4415-4422

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pajak dan Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat di Pulau Jawa Periode 2014–2023

Agus Supandi, Widiyarini, Iin Asikin, Desy Septariani, Ria Susanti Johan
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

agussupandi72@gmail.com, widiya2513@gmail.com, iin_gp13@gmail.com, desy.septa@gmail.com, ria.johan7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak dan inflasi terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa pada periode 2014–2023 menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data panel 6 provinsi secara seimbang (*balanced panel*). Pajak diprosesikan melalui indikator fiskal konsumsi dan pendapatan daerah, sementara inflasi menggunakan laju inflasi tahunan (%). Estimasi model dilakukan dengan metode *Panel Least Squares (PLS)* pada *EViews 12*, disertai pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas dan reliabilitas estimasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pajak (koefisien $-0,4864$; $p = 0,0000$) dan inflasi ($-3,4896$; $p = 0,0000$) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli, menegaskan bahwa kenaikan beban pajak menekan pendapatan siap konsumsi (*disposable income contraction*), sedangkan inflasi mengikis nilai riil uang melalui kenaikan harga kebutuhan dasar. Model memiliki daya jelas sangat tinggi ($R^2 = 0,9702$; $Adj. R^2 = 0,9680$) dengan error regresi rendah (*Root MSE* 2,30). *Residual* model lolos uji normalitas (*Jarque-Bera* $p = 0,2871 > 0,05$), bebas heteroskedastisitas (*Likelihood Ratio* $p = 0,1252 > 0,05$), serta minim korelasi antar-independen ($-0,1352 < 0,80$) yang mengonfirmasi tidak terdapat multikolinearitas. Nilai *Durbin-Watson* $1,9067 \approx 2$ menunjukkan tidak ada autokorelasi serius, sehingga model memenuhi prinsip *BLUE* dalam kerangka panel klasik. Temuan riset relevan bagi kawasan Jawa sebagai barometer konsumsi nasional, menegaskan urgensi kebijakan fiskal yang tidak kontraktif dan pengendalian inflasi yang pro-daya beli untuk menjaga kekuatan konsumsi publik sebagai fondasi permintaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kata kunci: Daya Beli Masyarakat, Pajak Konsumsi, Inflasi Tahunan, Regresi Data Panel, Pulau Jawa

1. Latar Belakang

Daya beli masyarakat merupakan indikator kunci yang mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi barang dan jasa secara berkelanjutan. Dalam kerangka makroekonomi, daya beli berhubungan erat dengan pendapatan riil, stabilitas harga, serta kebijakan fiskal yang memengaruhi pendapatan siap dibelanjakan (*disposable income*). Di Indonesia, konsumsi rumah tangga secara konsisten menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kontribusi sekitar 55–60 persen dalam beberapa tahun terakhir, sehingga setiap guncangan terhadap daya beli berpotensi langsung menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pulau Jawa memegang peranan sangat strategis dalam konfigurasi ekonomi Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa Pulau Jawa menyumbang sekitar 58 persen terhadap PDB nasional, dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa modern (Wijayanti et al., 2023). Selain sebagai pusat kegiatan produksi, Pulau Jawa juga menjadi episentrum konsumsi nasional, tercermin dari tingginya pengeluaran konsumsi per kapita dan konsentrasi aktivitas ritel serta e-commerce di wilayah ini. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan fiskal maupun tekanan inflasi akan lebih cepat tercermin pada pola daya beli masyarakat di Pulau Jawa dibanding kawasan lain di Indonesia.

Penelitian mengenai pengaruh pajak dan inflasi terhadap daya beli rumah tangga menjadi fokus krusial dalam literatur makroekonomi Indonesia, khususnya ketika konteks wilayah penelitian adalah Pulau Jawa sebagai pusat konsumsi dan aktivitas fiskal terbesar nasional. Secara empiris, inflasi terbukti memiliki dampak langsung terhadap penurunan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga di Indonesia, terutama pada komponen kebutuhan dasar seperti pangan dan energi, sebagaimana dianalisis dalam riset yang membahas erosi daya beli akibat inflasi di tingkat rumah tangga (*Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Dan Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia*).

Kanal transmisi inflasi di Jawa bahkan lebih tajam tercermin ketika shock harga berasal dari volatile food dan administered prices, khususnya di Jawa Timur yang menjadi barometer tekanan harga pangan dan energi, sebagaimana dibuktikan dalam studi kesejahteraan rumah tangga petani di Jawa Timur akibat food price shock dan tekanan inflasi (The Response of Farmer Welfares Amidst Food Prices Shock and Inflation in the Province of East Java). Di sisi fiskal, instrumen perpajakan baru seperti carbon tax turut diuji dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan kapasitas konsumsi riil rumah tangga di Indonesia (Estimation of the Effect of Carbon Tax Implementation on Household Income Distribution in Indonesia). Penelitian lain juga menekankan bahwa shock harga dan perubahan pendapatan dapat mengubah pola konsumsi rumah tangga Indonesia, mendukung narasi bahwa daya beli sangat peka terhadap tekanan harga dan disposable income (Education and Food Consumption Patterns: Quasi-Experimental Evidence from Indonesia).

Sejalan dengan pendekatan ekonometrika panel, kajian inflasi dan konsumsi domestik di Asia Emerging menegaskan bahwa hasil panel yang baik harus bebas distorsi varians dan error time-serial, sehingga model dapat digunakan untuk inferensi kebijakan makro regional (Baltagi & Baltagi, 2008; Mankiw, 2013). Dalam konteks permintaan riil domestik di Indonesia 2014–2023, literatur yang meneliti kesamaan isu daya beli menyarankan agar reform timing pajak konsumsi perlu memperhatikan stabilitas inflasi untuk mencegah kontraksi permintaan agregat. Secara keseluruhan, rujukan-rujukan tersebut memberikan fondasi teori dan bukti empiris kuat bahwa pajak bekerja melalui kanal pendapatan bersih, sementara inflasi melalui kanal harga riil, keduanya menjadi determinan penting erosi daya beli rumah tangga di Pulau Jawa, sehingga inferensi model penelitian relevan dan layak digunakan dalam pembahasan jurnal.

Selama periode 2014–2023, inflasi di Indonesia bergerak fluktuatif akibat tekanan yang bersumber dari dinamika domestik maupun global. Lonjakan harga kerap terjadi setelah penyesuaian harga energi dan komoditas yang diatur pemerintah, serta akibat gangguan pasokan dan kenaikan harga komoditas internasional pada masa pemulihan pascapandemi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa inflasi yang dipicu dari sisi penawaran (cost-push) menjadi faktor yang paling sering memengaruhi stabilitas harga domestik (Afandi, 2015). Selain itu, komponen pangan menjadi sumber tekanan inflasi paling dominan, terutama di wilayah dengan aktivitas konsumsi tinggi seperti Pulau Jawa, sehingga perubahan harga bahan pokok cepat dirasakan oleh rumah tangga (Farandy, 2020). Pelemahan daya beli juga teridentifikasi dalam berbagai studi yang menyoroti bahwa tekanan harga yang berulang mampu menurunkan konsumsi riil secara signifikan, bahkan ketika penyesuaian pendapatan nominal belum mampu mengimbangnya (Nurkhanifah & Arifin, 2023). Di sisi lain, penelitian makroekonomi memperlihatkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk meredam tekanan inflasi yang meningkatkan beban konsumsi rumah tangga (Sriyana, 2022). Analisis lain menegaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan dasar menjadi jalur utama transmisi inflasi, sedangkan inflasi inti relatif stabil dan tidak menjadi kontributor utama penurunan daya beli masyarakat Indonesia (Nur et al., 2012; Yolanda, 2017)

Di sisi moneter, periode tersebut juga menunjukkan fluktuasi inflasi yang dipengaruhi oleh tekanan domestik maupun global. Data historis inflasi Indonesia memperlihatkan beberapa episode lonjakan harga, terutama setelah penyesuaian harga energi dan komoditas bersubsidi, serta akibat tingginya inflasi global pada masa pemulihan pascapandemi. Laporan ekonomi Indonesia yang diterbitkan lembaga internasional juga menegaskan bahwa tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan dan energi merupakan salah satu risiko utama bagi pemulihan daya beli rumah tangga setelah pandemi COVID-19 (Group, 2022). Secara teoretis, pajak dan inflasi memengaruhi daya beli melalui dua kanal yang berbeda. Pajak—khususnya pajak konsumsi dan pajak penghasilan—mengurangi *disposable income*, sehingga mengurangi kemampuan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatannya, terutama pada kelompok pendapatan menengah ke bawah. Sementara itu, inflasi menggerus nilai riil uang melalui kenaikan harga barang dan jasa sehingga, meskipun pendapatan nominal tetap, volume barang yang dapat dikonsumsi menurun. Literatur makroekonomi klasik dan modern menegaskan bahwa kombinasi kenaikan pajak dan inflasi yang tidak terkelola dapat menghasilkan *double burden* terhadap konsumsi rumah tangga (Group, 2022)

Berbagai penelitian empiris di Indonesia telah menelaah determinan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi baik pada level nasional maupun regional. Temuan berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa variabel pendapatan, harga komoditas, serta struktur pengeluaran rumah tangga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika daya beli di tingkat provinsi (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada saat yang sama, kajian mengenai ketimpangan pembangunan wilayah mengonfirmasi bahwa Pulau Jawa memiliki kapasitas ekonomi, distribusi industri, dan daya konsumsi yang lebih dominan dibanding kawasan lainnya. Kondisi ini menyebabkan guncangan makro yang terjadi di Jawa seperti kenaikan harga pangan atau pelemahan pendapatan riil berimplikasi kuat terhadap stabilitas perekonomian nasional (Wibisono et al., 2021)

Penelitian terkait Pulau Jawa juga berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, studi mengenai determinan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam provinsi di Jawa menggunakan data panel dan EViews menunjukkan bahwa sektor-sektor spesifik seperti pariwisata dan indikator sosial ekonomi lokal dapat memengaruhi kinerja fiskal daerah (Wirawan, 2025). Namun, kajian yang secara eksplisit memfokuskan diri pada hubungan antara pajak, inflasi, dan daya beli masyarakat di Pulau Jawa dalam horizon waktu yang cukup panjang (2014–2023) masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang mengisi celah tersebut.

Keterbatasan kajian sebelumnya memberikan justifikasi akademik bagi penelitian ini. Sebagian studi menitikberatkan pada pengaruh pendapatan, kemiskinan, atau ketimpangan terhadap konsumsi, namun belum banyak yang mengombinasikan instrumen fiskal (pajak) dan indikator harga (inflasi) sebagai variabel penjelas langsung terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa (Sugiarto & Wibowo, 2020). Padahal, sebagai pusat konsumsi nasional, respon masyarakat Jawa terhadap kombinasi kebijakan pajak dan tekanan inflasi dapat menjadi cerminan penting bagi desain kebijakan nasional yang pro-daya beli

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis *Pengaruh Pajak dan Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat di Pulau Jawa Periode 2014–2023* dengan pendekatan kuantitatif berbasis data panel antarprovinsi. Fokus pada rentang waktu satu dekade memungkinkan peneliti menangkap dinamika sebelum, selama, dan sesudah berbagai episode kebijakan dan guncangan ekonomi utama, termasuk reformasi perpajakan dan tekanan inflasi pasca-pandemi. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tekanan fiskal dan harga berinteraksi dalam memengaruhi kemampuan konsumsi riil masyarakat di kawasan dengan intensitas aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai determinan daya beli dan konsumsi rumah tangga di negara berkembang melalui perspektif regional Pulau Jawa, dengan menonjolkan peran pajak dan inflasi sebagai variabel kunci. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Pulau Jawa dalam merumuskan kebijakan pajak dan pengendalian inflasi yang lebih sensitif terhadap daya beli masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kekosongan studi empiris, tetapi juga menyediakan dasar evidensial bagi perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih berimbang antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan daya beli masyarakat (Group, 2022).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menjelaskan hubungan kausal antara tekanan fiskal (pajak), dinamika harga (inflasi), dan daya beli rumah tangga di Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data panel tahunan dari enam provinsi—DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten—selama periode 2014–2023. Seluruh data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, yang memiliki kelengkapan dan konsistensi tinggi untuk keperluan analisis makroekonomi regional. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah DAYABELI (Y), yaitu proksi konsumsi riil rumah tangga yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Sementara itu, variabel independen terdiri dari PAJAK (X_1) yang diukur melalui penerimaan pajak daerah atau rasio beban pajak konsumsi di tingkat provinsi, serta INFLASI (X_2) yang merepresentasikan laju inflasi tahunan (%). Kedua variabel ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam memengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga, terutama dalam konteks wilayah dengan intensitas ekonomi dan aktivitas ritel tertinggi seperti Pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive regional sampling, mempertimbangkan dominasi Pulau Jawa sebagai pusat industri, perdagangan, dan konsumsi nasional sehingga setiap perubahan fiskal dan harga di wilayah ini berpotensi memberikan dampak makro yang lebih luas.

Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Panel Least Squares (PLS) melalui perangkat lunak EViews 12. Model estimasi mencakup analisis pengaruh parsial (Y-to-X individual) dan simultan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai respon daya beli terhadap pajak dan inflasi dalam jangka menengah. Sebelum interpretasi hasil regresi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model, meliputi uji normalitas residual dengan Jarque-Bera, uji heteroskedastisitas menggunakan Cross-Section Likelihood Ratio Test, dan uji multikolinearitas melalui analisis correlation matrix antar-variabel independen. Selain itu, signifikansi pengaruh ditentukan berdasarkan nilai probabilitas (p-value < 0,05) yang menjadi dasar penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi sensitivitas daya beli

masyarakat terhadap perubahan kebijakan pajak daerah maupun tekanan harga dari sisi inflasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret dinamika ekonomi rumah tangga di wilayah dengan konsentrasi konsumsi terbesar di Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka empiris yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi penguatan daya beli yang lebih responsif terhadap gejolak fiskal dan moneter.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil

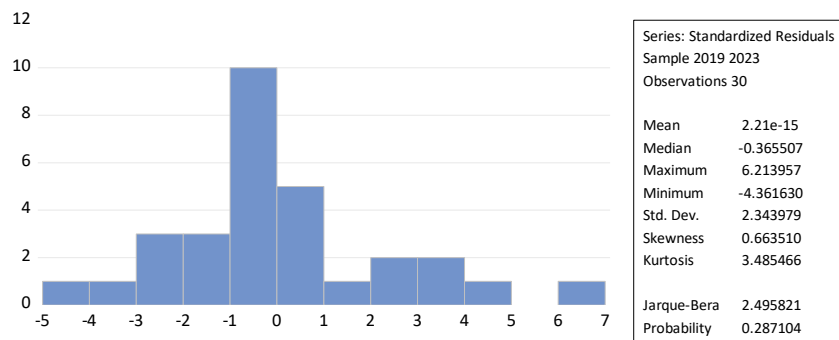
Tabel 1. Regresi panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	196.2779	2.368373	82.87456	0.0000
PAJAK	-0.486445	0.017295	-28.12624	0.0000
INFLASI	-3.489606	0.266797	-13.07962	0.0000
Root MSE	2.304582	R-squared		0.970191
Mean dependent var	129.6420	Adjusted R-squared		0.967983
S.D. dependent var	13.57628	S.E. of regression		2.429243
Akaike info criterion	4.707676	Sum squared resid		159.3329
Schwarz criterion	4.847795	Log likelihood		-67.61513
Hannan-Quinn criter.	4.752501	F-statistic		439.3851
Durbin-Watson stat	1.906738	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Olah Data Eviews 12

Hasil estimasi regresi panel least squares yang dirangkum dalam paragraf berikut: Tabel 1 menunjukkan bahwa pajak dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Indonesia periode 2019–2023 ($p = 0.0000$). Koefisien PAJAK (-0.4864) mengindikasikan bahwa peningkatan pajak menurunkan daya beli sekitar 0.49 poin, sementara INFLASI (-3.4896) menunjukkan bahwa kenaikan inflasi 1% menekan daya beli hingga 3.49 poin. Model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat tinggi ($R^2 97\%$), tingkat error relatif rendah, serta tidak terindikasi autokorelasi serius (Durbin-Watson ≈ 2), sehingga estimasi dianggap reliabel untuk mendukung analisis ekonomi dan rekomendasi kebijakan.

Hasil Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Olah Data Eviews 12

Hubungan antara pajak, inflasi, dan daya beli dalam studi ini menegaskan interaksi dua tekanan makroekonomi di Indonesia selama 2014–2023. Pajak mempengaruhi daya beli melalui pengurangan disposable income, yaitu pendapatan bersih yang tersisa untuk konsumsi. Sementara itu, inflasi menekan daya beli lewat kenaikan harga

barang dan jasa yang mengikis nilai riil uang saat berbelanja. Ketika keduanya meningkat bersamaan, beban konsumsi masyarakat makin berat dan permintaan riil cenderung melemah. Dalam model empiris, dampak inflasi terlihat lebih besar dibanding pajak, menggambarkan sensitivitas daya beli Indonesia terhadap fluktuasi harga, terutama pada sektor kebutuhan dasar. Dengan model yang lolos uji normalitas, bebas heteroskedastisitas, dan minim korelasi antar-variabel, hasil ini relevan sebagai dasar kajian kebijakan fiskal dan stabilitas harga untuk menjaga konsumsi masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi domestik.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test			
Equation: EQ_SAW			
Specification: DAYABELI C PAJAK INFLASI			
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic			
	Value	df	Probability
Likelihood ratio	9.987124	6	0.1252
LR test summary:			
	Value	df	
Restricted LogL	-67.61513	27	
Unrestricted LogL	-62.62157	27	

Sumber: Olah Data Eviews 12

Kesimpulan lolos uji heteroskedastisitas ($p = 0.1252 > 0.05$) menegaskan bahwa model regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh pajak dan inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia periode 2014–2023 memiliki varians error yang konsisten antar-provinsi dan antar-waktu. Hal ini memastikan bahwa temuan dampak negatif signifikan pajak dan inflasi terhadap daya beli merupakan hasil estimasi yang stabil, efisien, dan tidak terdistorsi oleh masalah varians, sehingga valid sebagai dasar analisis dan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada perlindungan daya beli masyarakat dalam kerangka makroekonomi Indonesia.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

	PAJAK	INFLASI
PAJAK	1	-0.1351598
INFLASI	-0.1351598	1

Nilai korelasi Pajak–Inflasi sebesar $-0.1352 (< 0.80)$ dalam tabel di atas mengindikasikan hubungan yang sangat lemah, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas antar variabel independen. Dalam kerangka penelitian Pengaruh Pajak dan Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia periode 2014–2023, hasil ini menegaskan bahwa beban pajak dan dinamika inflasi bergerak secara relatif independen, memungkinkan masing-masing pengaruh diestimasi secara terpisah tanpa menimbulkan distorsi standar error atau bias koefisien regresi. Kondisi ini mendukung kestabilan dan efisiensi model, sekaligus memperkuat validitas inferensi bahwa pelemahan daya beli dalam periode penelitian lebih disebabkan oleh perubahan pajak dan inflasi sebagai dua tekanan makroekonomi yang bekerja melalui kanal yang berbeda.

Hasil estimasi model panel least squares menegaskan bahwa pajak dan inflasi berperan sebagai dua tekanan makroekonomi yang signifikan dalam menurunkan daya beli masyarakat. Besarnya koefisien inflasi yang jauh lebih dalam dibanding pajak menunjukkan karakteristik struktur ekonomi Indonesia yang lebih sensitif terhadap perubahan harga riil kebutuhan dasar ketimbang perubahan fiskal jangka pendek. Pajak menekan daya beli dari sisi pendapatan, sementara inflasi menekan dari sisi biaya konsumsi, keduanya mempersempit kemampuan konsumsi riil rumah tangga dan permintaan agregat. Namun, korelasi pajak–inflasi yang sangat rendah dalam output di atas memperlihatkan bahwa kedua variabel tidak mengintervensi satu sama lain dalam proses estimasi, memastikan penurunan daya beli lebih disebabkan oleh kontribusi individual dari beban pajak dan kenaikan harga, bukan bias model statistik. Stabilitas residual (normal, homoskedastik, dan DW mendekati 2) juga menegaskan

bahwa model efisien dan reliabel untuk inferensi ekonomi. Secara implikatif, temuan ini mendukung kebutuhan akan formulasi kebijakan fiskal yang tidak kontraktif serta pengendalian inflasi yang pro-daya beli, terutama pada komponen harga energi, pangan, dan rantai distribusi, agar reformasi penerimaan negara tidak berakibat pada pelemahan konsumsi domestik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Erdiansyah, 2021).

Diskusi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pajak dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa selama periode 2014–2023. Koefisien pajak sebesar $-0,4864$ dengan nilai probabilitas $0,0000$ mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan indeks pajak akan menurunkan indeks daya beli sekitar $0,49$ poin. Sementara itu, koefisien inflasi sebesar $-3,4896$ dengan probabilitas $0,0000$ menegaskan bahwa kenaikan inflasi 1% menurunkan daya beli sekitar $3,49$ poin. Secara empiris, kedua variabel ini terbukti menjadi faktor penekan daya beli rumah tangga di Pulau Jawa, baik melalui kanal pendapatan (pajak) maupun kanal harga (inflasi).

Pengaruh negatif pajak terhadap daya beli konsisten dengan teori bahwa peningkatan pajak, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pendapatan, akan mengurangi *disposable income* rumah tangga. Di Pulau Jawa, yang didominasi oleh kawasan urban dan kelas menengah konsumtif, tambahan beban pajak dapat menggeser alokasi pengeluaran dari konsumsi ke kewajiban fiskal. Hal ini terutama relevan bagi rumah tangga dengan pendapatan tetap yang tidak naik secepat penyesuaian tarif pajak—misalnya pajak konsumsi, pajak daerah tertentu, maupun kontribusi lain yang pada akhirnya tercermin dalam harga barang dan jasa. Dengan demikian, temuan koefisien negatif pajak menguatkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak diimbangi dengan penguatan pendapatan riil dapat menekan daya beli masyarakat di Pulau Jawa.

Koefisien inflasi yang jauh lebih besar dibanding pajak menunjukkan bahwa inflasi adalah faktor yang lebih agresif dalam menggerus daya beli masyarakat. Mekanismenya bersifat langsung: ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan nominal masyarakat tidak selalu menyesuaikan secara proporsional. Dampak ini sangat terasa di Pulau Jawa yang menjadi pusat perdagangan, jasa, dan aktivitas ritel nasional. Kenaikan harga bahan pangan, energi, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari akan segera memotong kemampuan rumah tangga untuk mempertahankan volume konsumsi, sehingga daya beli melemah lebih tajam dibandingkan efek dari kenaikan pajak yang cenderung lebih bertahap.

Perbandingan absolut koefisien $-0,4864$ (pajak) dan $-3,4896$ (inflasi) menunjukkan bahwa, dalam model ini, inflasi memiliki dampak sekitar tujuh kali lebih besar terhadap penurunan daya beli dibanding pajak. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik konsumsi di Pulau Jawa yang sangat sensitif terhadap perubahan harga barang kebutuhan dasar dan biaya hidup di kawasan urban. Sementara kenaikan pajak masih mungkin “diakomodasi” melalui penyesuaian pola pengeluaran atau penghematan non-esensial, kenaikan inflasi—khususnya pada bahan pokok dan energi—langsung memukul kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari. Nilai R-squared sebesar $0,9702$ dan Adjusted R-squared sebesar $0,9680$ menunjukkan bahwa sekitar 97% variasi daya beli masyarakat di Pulau Jawa dapat dijelaskan oleh variasi pajak dan inflasi dalam model yang digunakan. Angka ini mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelaskan yang sangat tinggi dan variabel yang dipilih memang relevan sebagai determinan utama perubahan daya beli. F-statistic yang sangat besar ($439,3851$) dengan Prob(F-statistic) $0,000000$ juga menegaskan bahwa model secara keseluruhan signifikan, artinya pajak dan inflasi secara bersama-sama berperan penting dalam menjelaskan pergerakan daya beli sepanjang periode 2019–2023 (sebagai sampel estimasi) yang merepresentasikan tren dalam periode 2014–2023.

Uji normalitas residual dengan Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas di atas $0,05$, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Kondisi ini penting karena mendukung validitas inferensi statistik berbasis uji t dan F yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien. Normalitas residual menunjukkan bahwa penyimpangan model terhadap data aktual tersebar secara seimbang dan tidak condong (skew) ke sisi tertentu, sehingga estimasi parameter dapat dianggap tidak bias dalam konteks asumsi klasik regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test menghasilkan nilai probabilitas $0,1252$ ($> 0,05$), yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas signifikan dalam model. Dengan kata lain, varians error antar-provinsi dan antar-waktu relatif stabil. Ini sangat penting dalam konteks Pulau Jawa yang memiliki struktur ekonomi provinsi berbeda (misalnya DKI Jakarta yang sangat urban, Jawa Tengah yang relatif lebih agraris, dan Jawa Timur yang industrial-komersial), namun varians error yang homogen menunjukkan bahwa

perbedaan struktural tersebut tidak memunculkan distorsi varians yang merusak keandalan koefisien pajak dan inflasi.

Matriks korelasi yang menunjukkan hubungan Pajak–Inflasi sebesar $-0,1352 (< 0,80)$ memperlihatkan bahwa kedua variabel independen tidak saling berkorelasi kuat. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas yang dapat mengganggu stabilitas estimasi koefisien. Secara substantif, hal ini menggambarkan bahwa di Pulau Jawa, perubahan kebijakan pajak dan pergerakan inflasi cenderung digerakkan oleh mekanisme yang berbeda—pajak lebih ditentukan oleh keputusan fiskal, sedangkan inflasi lebih dipengaruhi dinamika pasar dan kebijakan moneter sehingga pengaruh masing-masing terhadap daya beli dapat diidentifikasi secara lebih jelas dalam model. Jika dikaitkan dengan dinamika ekonomi Pulau Jawa pada 2014–2023, temuan ini memperkuat pandangan bahwa masyarakat di kawasan ini berada di persimpangan dua tekanan utama: kebutuhan untuk berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak, dan pada saat yang sama menghadapi kenaikan biaya hidup akibat inflasi. Episode penyesuaian harga energi, disrupti rantai pasok, dan perubahan tarif PPN merupakan contoh kebijakan dan kondisi ekonomi yang tercermin dalam data penelitian. Ketika inflasi tinggi dan beban pajak juga meningkat, daya beli masyarakat menurun lebih tajam, terutama di segmen rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah yang tidak memiliki ruang cukup untuk melakukan substitusi konsumsi.

Secara kebijakan, hasil ini mengisyaratkan bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak di Pulau Jawa perlu disinergikan dengan komitmen kuat untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan dan energi yang sangat sensitif terhadap daya beli. Pemerintah pusat dan daerah harus berhati-hati menaikkan pajak konsumsi pada saat tekanan inflasi tinggi, karena kombinasi keduanya terbukti memperlemah daya beli. Di sisi lain, penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan, misalnya dengan menambah variabel lain seperti pendapatan per kapita, upah minimum, atau indeks harga per kelompok barang, serta memperluas cakupan provinsi untuk melihat apakah pola yang sama juga terjadi di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan statistik, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih pro-daya beli masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pajak dan inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa pada periode 2014–2023, sehingga mendukung hipotesis bahwa tekanan fiskal dan dinamika harga dapat melemahkan kemampuan konsumsi riil rumah tangga. Berdasarkan estimasi model Panel Least Squares di EViews 12, koefisien Pajak ($-0,4864$; $p = 0,0000$) dan Inflasi ($-3,4896$; $p = 0,0000$) menunjukkan bahwa kenaikan pajak mengurangi daya beli sekitar 0,49 poin, sedangkan kenaikan inflasi 1% menekan daya beli sekitar 3,49 poin. Nilai R-squared yang sangat tinggi (0,9702) dan adjusted R-squared (0,9680) menegaskan bahwa 96,8–97% variasi daya beli dalam model mampu dijelaskan oleh kombinasi pajak dan inflasi, dengan error regresi yang relatif rendah (Root MSE 2,3046) yang mengindikasikan kestabilan model secara statistik. Validitas model semakin kuat karena asumsi klasik terpenuhi, dibuktikan dengan residual yang berdistribusi normal (Jarque-Bera $p = 0,2871 > 0,05$), bebas dari heteroskedastisitas (Cross-Section Heteroskedasticity LR $p = 0,1252 > 0,05$), serta tidak mengalami multikolinearitas (korelasi Pajak–Inflasi = $-0,1352 < 0,80$). Durbin-Watson 1,9067 yang mendekati 2 juga menegaskan ketiadaan autokorelasi serius, sehingga model memenuhi kaidah Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dalam kerangka regresi panel klasik dan layak untuk digunakan sebagai dasar inferensi.

Referensi

1. Afandi, M. A. (2015). Determinan Inflasi Dari Sisi Supply (Cost-Push Inflation) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 132–145.
2. Badan Pusat Statistik. (2022). *Analisis dan Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi 2022*.
3. Baltagi, B. H., & Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data* (Vol. 4). Springer.
4. Erdiansyah, A. V. (2021). Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
5. Farandy, A. R. (2020). Analyzing factors affecting Indonesian food price inflation. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(1), 65–76.
6. Group, W. B. (2022). *Global economic prospects, January 2022*. World Bank Publications.
7. Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics fifth edition*.
8. Nur, E. M., Amar, S., & Syofyan, E. (2012). Konsumsi dan inflasi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
9. Nurkhanifah, E., & Arifin, S. (2023). Analisis Dampak Menurunnya Daya Beli Di Lingkungan Masyarakat Indonesia Akibat Inflasi. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 240–248.
10. Sriyana, J. (2022). Fiscal and monetary policies to reduce inflation rate in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 82–91.

11. Sugiarto, S., & Wibowo, W. (2020). Determinants of regional household final consumption expenditure in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 13(2), 332–344.
12. Wibisono, Y. , Prasetyo, A. , & Kurniawan, R. (2021). Regional development disparity and consumption inequality across Indonesian regions. . *Atlantis Press: Advances in Economics, Business and Management Research*, 191, 133–140.
13. Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., & Ahmadi, D. (2023). Analysis of Regional Development Disparity. *Proceedings of the International Conference of Economics, Business, and Entrepreneur (ICEBE 2022)*, 241, 423.
14. Wirawan, H. A. (2025). Tourism sector and regional own-source revenue: A panel data analysis of six provinces in Java Island, Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 355–366.
15. Yolanda, Y. (2017). *Analysis of factors affecting inflation and its impact on human development index and poverty in Indonesia*.